

AGAMA DAN POLITIK
(STUDI KECENDERUNGAN KETERLIBATAN AKTOR GEREJA TERHADAP DANNY
POMANTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020)



REGINA DWI PUTRI CAHYANI

E041201008



DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

**AGAMA DAN POLITIK
(STUDI KECENDERUNGAN KETERLIBATAN AKTOR GEREJA TERHADAP
DANNY POMANTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020)**

**REGINA DWI PUTRI CAHYANI
E041201008**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KOTA MAKASSAR
2024**

AGAMA DAN POLITIK
(STUDI KECENDERUNGAN KETERLIBATAN AKTOR GEREJA TERHADAP
DANNY POMANTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020)

REGINA DWI PUTRI CAHYANI

E041201008

Skripsi

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Politik

Pada

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KOTA MAKASSAR
2024

SKRIPSI

AGAMA DAN POLITIK

(STUDI KECENDERUNGAN KETERLIBATAN AKTOR GEREJA TERHADAP
DANNY POMANTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020)

REGINA DWI PUTRI CAHYANI

E041201008

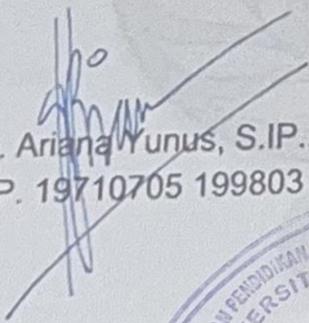
Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Pada tanggal, bulan, tahun
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

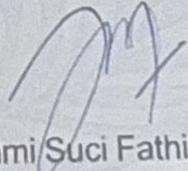
Pada 4 Juli 2024

Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Kota Makassar

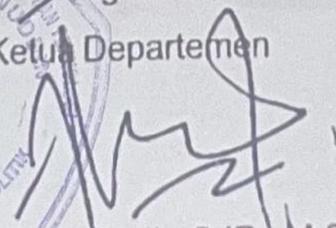
Mengesahkan,
Pembimbing Utama,


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
NIP. 19710705 199803 2 002

Pembimbing Pendamping


Ummi Suci Fathiyah Bailussy, S.IP., M.Si.
NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui,
Ketua Departemen


Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791218 200812 2 002



HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

AGAMA DAN POLITIK

**(STUDI KECENDERUNGAN KETERLIBATAN AKTOR GEREJA TERHADAP
DANNY POMANTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

REGINA DWI PUTRI CAHYANI

E041201008

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 29 Juli 2024

Menyetujui:

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.

(.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathiyah Bailussy, S.IP., M.Si.

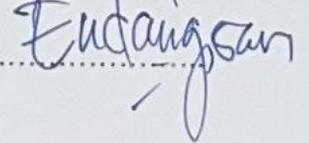
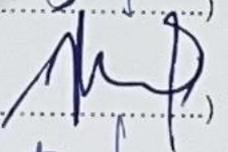
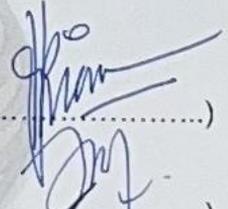
(.....)

Anggota I : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.

(.....)

Anggota II : Endang Sari, S.IP., M.Si.

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul Agama Dan Politik (Studi Kecenderungan Keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020) adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama, Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.SI selaku pembimbing utama dan Umami Suci Fathiyah Bailussy, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 11 Mei 2024



Regina Dwi Putri Cahyani

NIM E041201008

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan dapat terampungkaan atas bimbingan, diskusi dan arahan Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si selaku pembimbing utama dan Ummi Suci Fathiyah Bailussy, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Pendamping. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memastikan seluruh mahasiswa mendapatkan fasilitas dan kenyamanan yang layak selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Kepada kedua orang tua peneliti, Bayu Prakarsa, S.Ked dan Hasliah Lapatasi, karena beliau berdualah skripsi ini peneliti persembahkan. Terima Kasih juga kepada Saudari Penulis Dian Puspita Wulandari, S.Si. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing peneliti selama ini sehingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan peneliti dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

Ucapan terima kasih berikutnya saya persembahkan kepada lembaga Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan fasilitas bagi peneliti yang sangat layak dan nyaman untuk menuntun ilmu selama bertahun-tahun.

Ucapan dan doa saya kirimkan kepada (Alm). Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. serta Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada saya selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.

Kepada Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si, dan ibu Endang Sari, S.IP., M.Si. selaku penilai/penguji yang memberikan masukan dan saran yang membangun dengan penyampaian yang sederhana pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.

Ucapan terima kasih kepada Seluruh dosen departemen Ilmu Politik yang telah membagikan ilmu yang berharga kepada peneliti selama peneliti mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin selama hampir empat tahun. Seluruh ilmu tersebut akan peneliti terus kembangkan dan bagikan kepada orang lain.

Ucapan terima kasih tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh staff departemen Ilmu Politik yang telah membantu peneliti dalam hal pengurusan berkas

terkait kegiatan – kegiatan yang peneliti ikuti dan seluruh berkas persiapan ujian dan penyelesaian skripsi ini.

Kepada Sahabat – sahabat seperjuangan peneliti yang selalu siap mendengarkan apapun curhatan dan keluh-kesah peneliti serta bersedia memberikan banyak masukan mengenai skripsi hingga kehidupan peneliti yang sangat bermakna. Kepada sahabat – sahabat penulis sejak hari pertama perkuliahan, Nafira, Luthfi, Ratih dan rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah memberikan warna yang beragam terhadap kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di kampus, kalian adalah alasan penulis untuk terus berusaha dan berjuang agar kita dapat meraih kesuksesan bersama. Juga terima kasih kepada Miko, Miku, Temi, Tami, Kumi, Kimi, Tabi, Tori, Mika, Mike, Miki, Pussy, dan anak-anak kucing yang telah mendahului. Mereka senantiasa menemani penulis dan memberikan dukungan dan motivasi maupun mood untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

ABSTRAK

REGINA DWI PUTRI CAHYANI. **Agama Dan Politik (Studi Kecenderungan Atas Keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020.** (dibimbing oleh Ariana dan Ummi Suci Fathiyah Bailussy).

Latar Belakang. Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa ternyata secara tersirat terdapat kecenderungan aktor keagamaan yang terlibat terhadap pemilihan kepala daerah, termasuk dalam hal ini Kecenderungan Atas Keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. **Tujuan Penelitian.** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi Agama Dan Politik (Studi Kecenderungan Atas Keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020). **Metode Penelitian.** Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis naratif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Landasan Teori yang digunakan adalah perspektif institusionalisme baru yang dikaitkan dengan dan Konsep Aktor Politik, dan Konsep Etika Politik Kristen. **Hasil Penelitian.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gereja tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis. Namun, individu dalam gereja, seperti gembala, pendeta, dan jemaat, memiliki kebebasan moral dan interpersonal untuk membentuk persatuan dan kelompok diskusi guna menentukan pemimpin mereka. Contohnya, Jaringan Doa Kota Makassar secara persuasif mendukung calon Danny Pomanto, tetapi tanpa melibatkan gereja secara institusi. Aktivitas ini mencerminkan keterlibatan moral dan tersirat dalam politik, didukung oleh tokoh-tokoh penting dalam hierarki gereja yang memiliki pengaruh besar pada jemaat mereka. Penekanan pada prinsip agama dan politik dalam konteks Alkitab menunjukkan pemahaman yang dalam tentang relevansi nilai-nilai agama dalam politik modern. Dengan mengacu pada ayat Alkitab, penulis menyoroti peran gereja dalam masyarakat, menekankan pentingnya pendidikan politik dan kesadaran dalam proses politik. Hal ini mengindikasikan dukungan di luar gereja sebagai aktor gereja merupakan hal lazim sesuai Alkitab untuk bersatu dan menyiapkan pemimpin, yang sering diekspresikan melalui kegiatan diskusi dan persuasi dalam menentukan pemimpin. Selain itu, memang Danny Pomanto terus berupaya memenangkan dukungan dari jemaat dengan program yang menyatukan umat Kristen melalui acara sosialisasi di luar gereja. Hal ini disambut baik oleh masyarakat gereja selama periode pertama dan pemilihan 2020. Meskipun tidak selalu memberikan bantuan materi, upaya memfasilitasi beliau menunjukkan komitmen dan persaudaraan yang kuat dengan gereja.

Kata Kunci: Agama, Aktor Gereja, Politik, Walikota

ABSTRACT

REGINA DWI PRINCESS CAHYANI. **Religion and Politics (Study of Trends in the Involvement of Church Actors on the Influence of Danny Pomanto in the 2020 Makassar Mayor Election.**(supervised by Ariana and Umami Suci Fathiyah Bailussy).

Background. Many studies have shown that there is an implicit tendency for religious actors to be involved in regional head elections, including in this case the tendency for church actors to be involved in Danny Pomanto in the 2020 Makassar Mayoral Election. **Research Objectives.** This research aims to understand and identify Religion and Politics: Trends in the Involvement of Church Actors in Danny Pomanto in the 2020 Makassar Pemilihan walikota. **Research Method.** The type of research used is descriptive qualitative research with a narrative type. Data collection was carried out through interviews and documentation. The theoretical basis used is the new institutionalism perspective which is linked to the Concept of Political Actors, and the Concept of Christian Political Ethics. **Research result.** The results of this research show that the church is not directly involved in practical politics. However, individuals in the church, such as pastors, pastors, and congregants, have the moral and interpersonal freedom to form unions and discussion groups to determine their leaders. For example, the Makassar City Prayer Network persuasively supported candidate Danny Pomanto, but without involving the church institutionally. These activities reflected moral and implicit involvement in politics, supported by important figures in the church hierarchy who had great influence on their congregations. The emphasis on religious and political principles in the context of the Bible shows a deep understanding of the relevance of religious values in modern politics. By referring to Bible verses, the author highlights the role of the church in society, emphasizing the importance of political education and awareness in the political process. This indicates that support outside the church as a church actor is a common thing according to the Bible to unite and prepare leaders, which is often expressed through discussion and persuasion activities in determining leaders. Apart from that, Danny Pomanto continues to try to win support from the congregation with programs that unite Christians through socialization events outside the church. This was welcomed by the church community during the first period and the 2020 election. Even though he did not always provide material assistance, his facilitating efforts showed strong commitment and brotherhood with the church.

Keywords: *Religions, Church's Actor, Politics, Mayor*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I, PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3 Teori dan Konsep	5
1.3.1 Pendekatan Institusionalisme Baru	5
1.3.2 Aktor Politik.....	8
1.3.3 Etika Politik Kristen	11
1.3.4 Konsep Agama dan Politik.....	12
1.3.5 Penelitian Terdahulu.....	13
1.3.6 Skema Penelitian	18
BAB II, METODE PENELITIAN.....	19
2.1 Tempat dan Waktu.....	19
2.1.1 Tempat Penelitian	19
2.1.2 Waktu Penelitian	19
2.2 Metode Penelitian	20
2.2.1 Pendekatan Penelitian	20
2.2.2 Tipe Penelitian.....	21
2.2.3 Jenis Penelitian	21
2.2.4 Data Primer.....	21
2.2.5 Data Sekunder.....	21
2.3 Pelaksanaan Penelitian Data	22

	xi
2.3.1 Wawancara	22
2.3.2 Observasi	23
2.3.3 Dokumentasi	24
2.4 Pengamatan	24
BAB III, HASIL DAN PEMBAHASAN	25
3.1 Locus dan Objek Penelitian	25
3.2 Hasil Penelitian	28
3.3 Pembahasan dan Analisis	30
3.3.1 Kecenderungan keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto Pada Pemilihan walikota Makassar Tahun 2020	30
3.3.2 Upaya Danny Pomanto Sebagai Calon walikota dalam membentuk Pola Hubungan dan Strategi Komunikasi dalam Membangun keakraban Bersama Aktor dan Jemaat Gereja	37
3.3.3 Kemenangan Danny Pomanto Sebagai Walikota Makassar di Tahun 2020 ditunjukkan dengan dukungan Masyarakat	40
BAB IV, PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 (Skema Penelitian)	18
Gambar 3 (Peta Kota Makassar)	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Jumlah Penduduk Kota Makassar).....	3
Tabel Data Wawancara Bersama Masyarakat.....	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gereja adalah institusi rohani tempat berkumpul jemaat dari segala tempat dan segala abad, persekutuan segala orang percaya. Istilah Gereja berasal dari bahasa portugis igreja dan melalui bahasa latin *ecclesia*, yang keduanya berasal dari bahasa Yunani *ekklesia*. Di dunia Yunani kata “*ekklesia*” (dari kata kerja “Kaleo”) mula-mula berarti: mereka yang dipanggil keluar, yaitu orang-orang merdeka yang oleh seorang bentara dipanggil berhimpun untuk menghadiri rapat rakyat. Jadi dapat dikatakan bahwa Gereja tempat untuk yang dipanggil, mereka dipanggil untuk berhimpun, yaitu oleh Allah (Van Niftrik & Boland, 2001, hlm. 359).

Mengamati situasi politik yang ada tentulah muncul beberapa kompleksitas termasuk apabila mengaitkan agama dan politik, dalam hal ini kecenderungan Aktor Gereja dan politik yang dimana orang meyakini bahwa sikap ini sebagai warga negara terhadap gereja dan aktor politik ialah bisa negatif atau positif. Memilih kedua sikap tersebut tentulah dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Menurut Rungkat, orang percaya/Gereja terhadap politik bersikap antipati, curiga, pasif, dan manipulatif. Jadi ada Gereja yang melihat politik itu sebagai “momok” yang menakutkan dan “kotoran” yang menjijikkan. Karena itu mereka menentang semua peran Gereja dalam bidang politik (Udju & Rohi, 2017). Tapi adapula yang justru mengacu pada Alkitab bahwa jemaat dan umat Kristen wajib untuk menyiapkan umat dalam persiapan menentukan pemimpin, hal itu juga merupakan *responsible*. Sehingga tidak heran memang ada bahasan yang cukup kompleks. Haris Jo mengatakan, secara umum gereja seharusnya tidak berpolitik praktis. Bukan karena politik itu kotor dan gereja itu suci, tetapi untuk menjaga netralitas dan kesaksian gereja yang harus menyuarakan suara kenabian bagi pihak-pihak yang terlibat politik. Tetapi dalam konteks kecenderungan aktor gereja dalam politik itu baru benar, namun perlu kehati-hatian, sebab memang dukungan aktor gereja adalah bentuk interpersonal moral yang bisa dibilang merupakan bagian dari hak warga negaran dan hak demoratis setiap individu. Berbeda dengan pandangan Adolf Bastian Simamora justru mengatakan warga gereja seharusnya tidak perlu merasa “tabu” berbicara tentang politik, atau mengatakan bahwa politik itu bukan urusan gereja dengan alasan dapat mencemarkan kekudusan gereja. Ketika tinggal di bumi, Yesus sendiri tidak

menghindar dari kegiatan politik (Rubrik Kristen, 2024). Ia pernah ditanya oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang pajak, "Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" (Mat. 22:17). "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah" (Mat 22:21), (Simamora, 2018).

Pada dasarnya politik itu memiliki arti yang baik yaitu menata negara dengan sebuah sistem yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan setiap warga negara. Politik menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sehingga analisa sederhannya, ketika politik punya tujuan yang baik dalam menata, sehingga tidaklah salah ketika ada kecenderungan aktor gereja sebagai warga negara yang baik menunjukkan dukungannya pada pesta demokrasi.

Dalam perjalanan sejarah, silih berganti para apologet dan para teolog Kristen, berusaha untuk mencari hubungan yang relevan antara gereja dan negara, dan kegiatan berpolitik sebagai tanggung jawab warga gereja selaku warga negara. Belakangan kebanyakan dari mereka ber-pendapat bahwa gereja harus dipisahkan dari negara. Negara tidak boleh mencampuri urusan gereja, sebaliknya gereja patut memberikan sumbangsih sebagai perwujudan dari "menjadi garam dan terang dunia", (Binus, 2024).

Pada pemilihan presiden 2014 – 2019, PGPI (Persekutuan Gereja Pantekosta di Indonesia) mengeluarkan sebuah surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Pdt. Jacob Nahuway dimana isinya adalah mendukung Gerindra dan Prabowo untuk menjadi RI-1 lima tahun kedepan. Beliau pun mengeluarkan surat edaran ke seluruh gereja di bawah PGPI di Indonesia, yang jumlahnya kira-kira 12 juta jiwa. Beliau menyatakan dukungannya pada Gerindra dan Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan dengan argument bahwa Presiden harus berlatar belakang militr/TNI, agar Indonesia tidak kacaun balau. (David Ming,2021).

Hubungan antara agama dan politik memang perlu dijaga dengan hati-hati. Ketika agama terlibat dalam ranah politik, ada risiko konflik kepentingan, intoleransi, atau bahkan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, politik yang terlalu mengintervensi urusan keagamaan dapat mengancam kebebasan

beragama dan memicu konflik sosial. Penting untuk memahami batasan dan menjaga keseimbangan antara kedua bidang ini demi mewujudkan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Tulisan Mikhael Rajamuda Bataona dan Atwar Bajari tentang Gereja di Nusa Tenggara Timur juga menyebutkan bahwa dalam dua kali Pemilihan Gubernur di Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wali Kota Kupang, keterlibatan Gereja terutama otoritas Gereja Katolik sangat nyata dalam memberikan dukungan politik terhadap kandidat tertentu. Temuan Bataona dan Bajari didukung oleh testimoni beberapa pihak bahwa dalam pemilihan kepada daerah di banyak kabupaten di Nusa Tenggara Timur, otoritas Gereja juga berpolitik praktis (Mikhael Rajamuda Bataona & Atwar Bajari, 2017).

Tulisan Abu Bakar & Muh. Wahyu tentang Gereja dan Partisipasi Politik juga menyebutkan Kehadiran Nurdin Halid sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan pada perayaan Natal di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Rajawali Kota Makassar tahun 2018 dan disambut hangat oleh jemaat Gereja HKBP menandakan bahwa Gereja tidak menutup diri dari politik. Bahkan Pendeta HKBP, Pansur Sijabat mengakui sudah saatnya Nurdin Halid maju sebagai pemimpin Sulawesi Selatan. Pada kasus yang lain, Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar melalui kanal Youtube Komkep Kams Official yang diikuti sekitar 1.300-an *subscribers* melakukan sosialisasi politik yang mengajak pemuda dan masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar menggunakan hastag #OMKAntiGoput yang menandakan bahwa mereka mendorong agar masyarakat tidak “golput” pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

Gereja sebagai situs keagamaan memang sejatinya dan seharusnya tidak berpolitik akan tetapi peneliti ingin menggambarkan bagaimana kecenderungan aktor gereja berperan dalam mendukung Danny Pomanto pada pilwakot Makassar 2020. Berdasarkan objek penelitian di Kota Makassar, terlihat jumlah penduduk Kota Makassar sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Kota Makassar

Jumlah Penduduk Kota Makassar	Jumlah Penduduk Menurut Agama	
	Kristen	Katolik

1.423.877	114,631	47,376
Jumlah	162.007	

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut agama Kristen dan Katolik, Mengindikasikan bahwa apakah ada kecenderungan keterlibatan aktor gereja dalam mendukung Danny Pomanto pada pemilihan walikota 2020. Apalagi pada periode pertama sebelum 2020, artikel menunjukkan keaktifan Danny Poamnto sebagai Walikota yang juga cenderung memiliki hubungan yang baik dengan gereja, kelompok keagamaan, dan beberapa jaringan umat Kristen. Selain itu, data BPS menunjukkan bahwa di Kota Makassar umat kristiani banyak ditemukan untuk wilayah kecamatan Makassar, dan kecamatan Panakkukang, dan terbilang cukup era tatas sebuah ikatan jaringan dan komunitas mereka sebagai umat Kristen.

Terlepas dari data tersebut, kenapa harus Danny Pomanto? Karena Beliau merupakan walikota yang *incumbent* dan berhasil memenangkan pilwali makassar selama dua periode. Bahkan sejak periode pertama beliau sudah sering memunculkan diri untuk berupaya membentuk program yang *all in one* dan berusaha meng-*engage* semua kalangan dan kelompok. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Agama Dan Politik (Studi Kecenderungan Atas Keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020)**”. tentunya akan berkenaan mengenai sejauh mana aktor dalam gereja ini cenderung menunjukkan dukungannya terhadap pemenang walikota Danny Pomanto di Makassar pada tahun 2020.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah: Bagaimana Kecenderungan keterlibatan Aktor Gereja Dalam Mendukung Danny Pomanto pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dan menganalisis keterlibatan Aktor Gereja terhadap Danny Pomanto pada Pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang dalam rangka pengembangan ilmu politik serta memperkaya kajian terkait Kecenderungan keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto pada Pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik yang memiliki minat pada strategi politik dan politik identitas, terkhusus para mahasiswa ilmu politik yang ingin memperkaya wawasan pengetahuan masyarakat yang senantiasa terlibat dalam dunia politik.

1.3 Teori dan Konsep

1.3.1 Pendekatan Institusionalisme Baru

Institusionalisme Baru (*New Institutionalism*) berbeda dengan pendekatan- pendekatan lain, dimana ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme Baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Sebut saja misalnya, Institusionalisme Baru sosiologi, Institusionalisme Baru ekonomi, dan sebagainya (Budiardjo, 2007, hlm. 96)

Dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menurut Jan- Erik Lane dan Svante Ersson, institusi mencakup (1) Struktur isik, (2) Struktur demograis, (3) Perkembangan historis, (4) Jaringan pribadi, dan (5) Struktur sementara (yaitu keputusan-keputusan sementara). Institusi adalah peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama.

Institusi-institusi memengaruhi dan menentukan cara para aktor berusaha mencapai tujuannya. Institusi menentukan: (a) siapa aktor yang sah (b) jumlah aktor (c) siapa menentukan tindakan. Institusi memberi

stabilitas, sebab tidak dapat diubah begitu saja. Institusi mempunyai kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin mengubah institusi tertentu akan mempertimbangkan akibat-akibat yang sering tidak dapat diramalkan. Inti dari Institusionalisme Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut: (Ikmal, Novita, Magister Ilmu Politik, & Fisip Unair, n.d.)

- (1). Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
- (2). Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi- institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
- (3). Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing- masing.
- (4). Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
- (5). Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
- (6). Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing (Goodin, 1996).

Bagi penganut Institusionalisme Baru, pokok masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Dalam usaha menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana dalam masyarakat mengenai cara bagaimana mengubah institusi yang ada agar menjadi lebih demokratis. Proses ini dapat disebut *institutional engineering* (rekayasa institusional) melalui suatu *institutional design* (rancangan institusional). Suatu design adalah ciptaan dari suatu

rencana aksi untuk meraih hasil-hasil yang bernilai dalam konteks tertentu (*Design is a creation of an actionable form to promote valued outcomes in a particular context*).

Pendekatan institusionalisme baru adalah kerangka teoretis yang digunakan dalam ilmu politik untuk menganalisis bagaimana institusi politik, seperti aturan, norma, dan prosedur, mempengaruhi perilaku dan hasil politik.

Pendekatan Institusionalisme Baru memiliki perspektif yang menarik terkait peran gereja dalam politik. Meskipun tidak ada pendekatan tunggal yang mencakup semua pandangan dalam institusionalisme baru, berikut adalah beberapa pemahaman umum tentang bagaimana pendekatan ini melihat gereja dalam konteks politik:

- (1). **Institusi Gereja sebagai Aktor Politik:** Pendekatan ini melihat gereja sebagai aktor politik yang memiliki peran dan pengaruh dalam proses pembuatan keputusan politik. Gereja dianggap memiliki kekuatan moral dan sosial yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku politik individu dan masyarakat.
- (2). **Norma dan Nilai dalam Politik:** Institusionalisme baru memperhatikan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh gereja sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan politik. Gereja sering kali memiliki pandangan moral dan etika yang dapat membentuk kebijakan politik dan mempengaruhi pandangan masyarakat.
- (3). **Peran Gereja dalam Membentuk Kebijakan Publik:** Pendekatan ini mengakui peran gereja dalam membentuk kebijakan publik. Gereja dapat berperan sebagai advokat isu-isu sosial dan moral, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebijakan kesehatan. Gereja juga dapat berpartisipasi dalam dialog politik dan memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan politik.
- (4). **Dampak Gereja terhadap Perubahan Institusional:** Institusionalisme baru mempertimbangkan dampak gereja dalam membentuk dan mengubah institusi politik. Gereja dapat

mempengaruhi perubahan kebijakan, reformasi institusi, dan transformasi politik melalui pengaruh moral dan sosialnya.

Pendekatan Institusionalisme Baru mengakui kompleksitas peran gereja dalam politik dan melihat gereja sebagai institusi yang dapat memiliki pengaruh signifikan dalam proses politik dan pembentukan kebijakan. Namun, pandangan dan interpretasi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif individu yang mengadopsi pendekatan ini.

Dengan menerapkan pendekatan institusionalisme baru dalam analisis Peran Gereja Dalam Mendukung Danny Pomanto, kita dapat memahami bagaimana institusi gereja dan faktor-faktor lainnya saling berinteraksi.

1.3.2 Aktor Politik

Konsep aktor politik dalam konteks "Kecenderungan Atas Keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto pada Pemilihan walikota Makassar 2020" mencakup peran serta gereja atau lembaga keagamaan dalam proses politik lokal, khususnya dalam pemilihan walikota mencakup semua entitas atau individu yang terlibat dalam proses politik, termasuk partai politik, kandidat, kelompok kepentingan, dan dalam konteks ini, gereja atau lembaga keagamaan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa keterlibatan aktor gereja dalam politik dapat bervariasi secara signifikan antara negara dan budaya. Di beberapa tempat, gereja memiliki pengaruh politik yang kuat dan seringkali terlibat secara langsung dalam mendukung atau menentang kandidat atau kebijakan tertentu. Di tempat lain, terdapat pemisahan yang jelas antara agama dan negara, dan keterlibatan gereja dalam politik mungkin dianggap kontroversial atau tidak diinginkan.

Namun demikian, dalam banyak kasus, gereja atau lembaga keagamaan dapat menjadi aktor politik yang signifikan dalam pemilihan lokal seperti pilkada walikota. Keterlibatan mereka bisa meliputi dukungan

terhadap kandidat tertentu, mobilisasi massa untuk memilih, atau bahkan mencalonkan tokoh dari lingkungan keagamaan itu sendiri.

Konsep aktor politik dalam konteks ini dapat melibatkan analisis tentang bagaimana pengaruh gereja atau lembaga keagamaan memengaruhi dinamika politik lokal, termasuk bagaimana hal itu memengaruhi hasil pemilihan dan kebijakan yang diimplementasikan setelahnya. Ini juga bisa mencakup studi tentang hubungan antara aktor politik lainnya (seperti partai politik atau kelompok kepentingan lainnya) dengan gereja atau lembaga keagamaan, dan bagaimana kerjasama atau konflik antara mereka memengaruhi proses politik secara keseluruhan. Jadi, konsep aktor politik dalam konteks keterlibatan aktor gereja dalam kemenangan pilkada walikota melibatkan analisis tentang bagaimana peran serta dan pengaruh gereja atau lembaga keagamaan berdampak pada dinamika politik lokal dan hasil pemilihan.

Dalam sebuah pernyataan berbunyi Collin Hay *“Actors are conceptualised as conscious, reflexive and strategic. They are, broadly, intentional in the sense that they may act purposively in the attempt to realise their intentions and preferences. However, they may also act intuitively and/or out of habit. Nonetheless, even when acting routinely they are assumed to be able to render explicit their intentions and their motivations.”* Makna dari konsep yang dikemukakan tentang aktor politik oleh Colin Hay tersebut, menyuguhkan sebuah pandangan bahwa aktor politik mempunyai konseptualisasi sebagai individu/kelompok yang secara sadar dengan posisi yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan keinginannya dengan dasar pilihan mereka. Preferensi aktor politik tentu di dasarkan dari kepentingan yang dimiliki sang aktor politik (Shibghotulloh, Al-Banjari, & Djuyandi, 2020).

Teori aktor politik merupakan suatu kerangka kerja analisis yang menekankan aktor-aktor individu atau kelompok dalam proses politik. Dalam konteks judul “Kecenderungan Peran Gereja dalam mendukung Danny Pomanto pada Pemilihan walikota Makassar tahun 2020” bahwa gereja, seperti banyak institusi agama lainnya, memiliki peran dalam politik di Indonesia. Meskipun seharusnya ada pemisahan antara agama

dan negara, dalam praktiknya, agama seringkali mempengaruhi politik dan kebijakan publik.

Gereja bisa mempengaruhi politik dengan berbagai cara. Misalnya, gereja melalui pendeta bisa mempengaruhi pemilih (masyarakat gereja) melalui khotbah dan pesan moral mereka. Mereka juga bisa berperan dalam membentuk opini publik tentang isu-isu sosial dan politik.

Adapun aktor yang dilihat secara garis besar dalam penelitian ini ialah aktor gereja, dimana aktor gereja acapkali merujuk pada siapa saja yang menjadi tokoh dan terlibat dalam sebuah gereja, sehingga untuk mendukung penelitian ini, perlu diketahui bahwa Konsep "aktor gereja" mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam kehidupan gereja. Ini dapat mencakup beragam orang dan entitas yang berkontribusi pada fungsi gereja secara keseluruhan. Beberapa aktor gereja yang umum meliputi:

1. Gembala: Petinggi dan pimpinan Yayasan Gereja
2. Pendeta/Pastor: Orang yang bertanggung jawab atas pengajaran, pelayanan pastoral, dan pengelolaan gereja secara umum.
3. Jemaat: Anggota gereja yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ibadah, pelayanan, dan kegiatan gereja lainnya.
4. Pengurus Gereja: Kelompok orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan administratif dan keuangan gereja, termasuk dewan gereja, bendahara, dan sekretaris.
5. Pengurus Pelayanan: Individu atau tim yang mengoordinasikan berbagai pelayanan gereja, seperti pelayanan remaja, pelayanan sosial, pelayanan musik, dll.
6. Karyawan Gereja: Orang-orang yang dipekerjakan oleh gereja untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, seperti sekretaris gereja, pengurus keuangan, atau staf pelayanan.
7. Komisi/Komite: Grup orang yang bertanggung jawab atas area spesifik dalam kehidupan gereja, seperti pendidikan Kristen, pelayanan misi, atau pembangunan.
8. Pengajar dan Pendeta Tamu: Orang-orang yang diundang untuk memberikan pengajaran atau khotbah di gereja.

9. Sekolah Minggu/Pendidikan Kristen: Orang-orang yang terlibat dalam pengajaran dan pemuridan anak-anak dan remaja di gereja.
10. Pengurus Properti: Orang-orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan bangunan gereja dan properti gereja lainnya.
11. Pelayan Musik: Orang-orang yang bertanggung jawab atas musik dalam ibadah, seperti pemimpin pujian, pemain musik, dan paduan suara.

Ini hanya beberapa contoh, dan dalam praktiknya, aktor gereja dapat bervariasi tergantung pada denominasi, ukuran gereja, dan struktur organisasi yang diterapkan.

1.3.3 Etika Politik Kristen

Etika teologis memandang, semua bidang hidup manusia dipandang dari pernyataan kehendak Tuhan. Dalam pemahaman Iman Kristen, politik adalah upaya manusia untuk mengusahakan kehidupan dan kesejahteraan bersama. Politik adalah bagian integral dari tugas yang telah diamanatkan Allah kepada manusia baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Politik tidaklah netral dan juga tidak terlarang! (bdk. Kej. 1:26, 2:15).

Konsep etika politik Kristen menekankan pada prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran agama Kristiani dan bagaimana hal itu memengaruhi keterlibatan aktor gereja dalam proses politik seperti pemilihan walikota. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang menjadi pijakan etika politik Kristen. Pertama, terdapat penekanan pada keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini mengimplikasikan bahwa aktor gereja yang terlibat dalam kemenangan pilkada harus bertindak secara adil dan mengutamakan kepentingan bersama tanpa memihak satu pihak. Kedua, terdapat prinsip tanggung jawab sosial, di mana gereja dipandang memiliki peran untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat dan memperjuangkan kebaikan bersama. Dalam konteks politik, hal ini mencerminkan pentingnya partisipasi aktif gereja dalam mendorong pemimpin yang berintegritas

dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga tanpa pandang suku, agama, atau status sosial. Selain itu, etika politik Kristen juga menyoroti pentingnya kebenaran dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses politik. Oleh karena itu, aktor gereja yang terlibat dalam kemenangan pilkada diharapkan untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan mengutamakan kepentingan umum demi terwujudnya tatanan politik yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.

Menghadapi situasi bangsa dan negara yang pluralistik dan masalah lain yang menyangkut politik, hukum, ekonomi, moral dan HAM, gereja harus dapat memperlengkapi warganya dengan nilai-nilai moral, etik dan spiritual untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, khususnya di bidang politik.

Kent Greenwalt mengatakan bahwa pendirian dan ajaran agama pasti memengaruhi pengambilan keputusan politik (Greenwalt, 1988: 35). Hal inipun terjadi pada gereja, mengingat gereja merupakan intitusi agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan pelayanan gereja terhadap bangsa dan negara.

Berkaitan dengan urusan politik, Jurgen Moltmann, seperti yang dikutip oleh Wowor, mengklaim bahwa teologi bisa saja naif dan tidak peka politik, tetapi teologi tidak boleh lepas keterhubungannya dengan politik atau dengan kata lain, teologi tidak boleh menutup mata terhadap realitas politik. Melalui

teologinya, gereja wajib menjadikan dunia politik sebagai bidang pelayanan yang tidak boleh diabaikan bahkan gereja harus terlibat di dalam pelayanan tersebut..

1.3.4 Konsep Agama dan Politik

Relasi antara agama dan politik seringkali menjadi medan tarik-menarik kepentingan. Agama memiliki peran penting dalam membentuk kerangka nilai dan norma yang mengatur masyarakat dan struktur negara. Di sisi lain, negara menggunakan agama sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengendalikan perilaku

warganya. Dinamika hubungan ini seringkali menghasilkan situasi di mana salah satu entitas mendominasi yang lain.

Negara yang terlalu dipengaruhi oleh kekuatan agama bisa berujung pada teokrasi, di mana nilai-nilai agama menjadi landasan utama pembuatan kebijakan. Namun, dalam konteks ini, seringkali terjadi hipokrisi moral dan etika, karena kekuasaan agama seringkali dieksploitasi oleh para pemimpinnya. Di sisi lain, jika negara terlalu dominan dan membatasi peran agama, ini bisa menciptakan negara sekuler di mana agama hanya memiliki pengaruh terbatas dalam kehidupan publik. Keseimbangan antara kedua entitas ini menjadi kunci dalam membangun negara yang stabil dan adil.

Isu tentang hubungan antara agama dan politik telah menjadi perbincangan lama dalam sejarah manusia modern. Perdebatan ini selalu menimbulkan kontroversi mengenai posisi agama dalam dunia politik yang sering kali membagi dua pandangan yang bertentangan. Di satu sisi, ada pihak yang mengadvokasi untuk keterlibatan agama dalam setiap aspek politik, yang dikenal sebagai teokrasi, di mana agama menjadi pondasi utama dalam pembuatan kebijakan politik. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok yang menentang campur tangan agama dalam urusan politik, memandang agama sebagai hal yang lebih bersifat privat dan hanya berkaitan dengan individu.

Dalam konteks politik Indonesia, isu ini telah mempengaruhi perjalanan sejarah bangsa tersebut sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah perubahan dalam pembentukan Piagam Jakarta, di mana poin yang awalnya mencantumkan "ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya" diganti menjadi "Ketuhanan yang maha esa" untuk mencegah konflik di antara berbagai kelompok masyarakat.

1.3.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah temuan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini berupaya untuk mencari perbandingan dari penelitian yang akan

dilakukan. Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- (1). Penelitian pertama yang dilakukan oleh Fantri Galatia Rakristian pada tahun 2016 yang berjudul "Sebuah Kajian Teologis-Politis Sikap Gereja Terhadap Warga Jemaat Yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif GKJW Jemaat Banyuwangi". Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Gereja bukan lembaga surgawi yang terpisah dari konteksnya, tetapi gereja adalah lembaga yang bersentuhan dengan realitas pergumulan umatnya. Oleh karena itu gereja dapat memberikan makna bagi dimensi politik yang melekat pada warganya yang sekaligus juga warga negara. Dalam konteks kondisi di Indonesia, misalnya seperti Pemilihan Calon Anggota Legislatif, dimana semua keputusan diserahkan kepada rakyat sebagai pemilih, maka apa peran yang dapat dilakukan oleh gereja? Apakah gereja harus berjuang bagi terpilihnya warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam hal ini? Atau gereja mesti memperjuangkan siapa saja yang memiliki komitmen tinggi terhadap penegakkan keadilan dan sebuah masyarakat anti diskriminasi serta mampu melahirkan pemerintahan yang bersih. GKJW Jemaat Banyuwangi dipanggil kedunia untuk membina, membimbing dan mengarahkan jemaatnya demi menjawab setiap kebutuhan warga jemaat termasuk mendampingi warga jemaat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif namun saat ini GKJW Banyuwangi masih kurang terbuka dengan politik sehingga Pendeta hanya melayani pendampingan warga jemaat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif secara pribadi. Selain itu, pemahaman politik yang kurang dimiliki oleh warga jemaat sehingga membuat warga jemaat mengalami kegamangan akan sikap yang seharusnya dilakukan sebagai warga jemaat. GKJW Jemaat Banyuwangi dapat dikatakan memilih untuk berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai warga jemaat yang berpolitik praktis seperti yang dilakukan oleh Majelis Jemaat, tujuannya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pepecahan dalam gereja karena tidak semua

warga jemaat memiliki pemahaman politik yang baik. Jika warga jemaat salah bersikap, maka gereja yang akan bertanggungjawab memperbaiki keadaan. Berdasarkan teori Malcolm Brownlee. Gereja adalah salah satu sumber dukungan moral, dukungan yang dimaksudkan adalah dukungan jiwa dan semangat, dukungan tenaga, dukungan materi dan dukungan rohani. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gereja kurang menjalankan fungsinya secara maksimal berkaitan dengan masalah tersebut, dalam hal ini gereja belum menjadi unit yang memberikan perhatian bagi warga jemaat yang memiliki tujuan untuk menjadi anggota legislatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa gereja memiliki peran yang penting dalam memberikan berbagai dukungan bagi warga jemaatnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran gereja dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan, tahun penelitiannya dan juga objek yang mau di teliti.

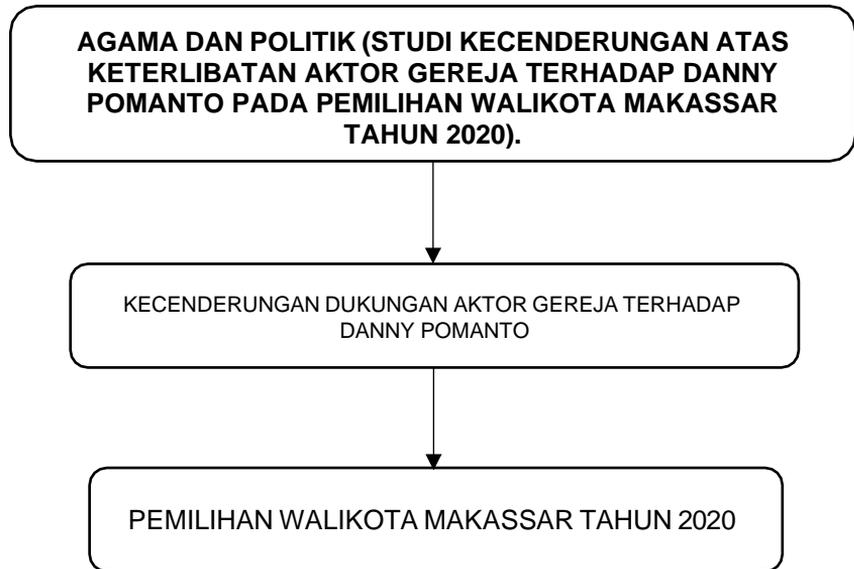
- (2). Penelitian kedua di lakukan oleh Abu Bakar dan Muh. Wahyu pada tahun 2022 yang berjudul "Gereja dan Partisipasi Politik". Berdasarkan hasil penelitian, Agama dan negara/politik sejauh ini masih menjadi perdebatan banyak kalangan. Sebagian berpendapat bahwa agama pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan negara atau politik. Sebaliknya berpandangan bahwa agama harus dijauhkan dengan dinamika politik praktis karena kedua-nya berbeda. Agama dipandang sebagai urusan privat yang bersifat transenden, sementara politik adalah ranah publik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga keduanya tidak dapat disatukan. Di Makassar, sekalipun Gereja Katolik tidak menyatakan sikap politik secara jelas dan berpihak kepada kandidat tertentu, akan tetapi upaya mereka terutama dari Komite Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar yang mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 menjadi relevan dengan ajaran dalam *Gaudium et Spes*. Sekalipun langkah

dan metode yang dilakukan melalui kanal Youtube, namun demikian cara tersebut sudah dapat dianggap cukup mengingat situasi pandemi *Covid-19*. Sebaliknya, Gereja Kristen kelihatan justru lebih terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada kandidat tertentu. Terutama kesediaan mereka menerima kandidat di dalam Gereja dan diperkenalkan kepada jemaat sebagaimana yang dilakukan oleh pengurus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Makassar ketika mem perkenalkan Nurdin Halid kepada jemaat sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran gereja dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan juga lokasi penelitian yaitu Kota Makassar. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tahun penelitiannya, dan juga tinjauan pustakanya, penelitian terdahulu menggunakan teori partisipasi politik sedangkan penelitian ini menggunakan konsep peranan dan teori perilaku pemilih.

- (3). Penelitian ketiga dilakukan oleh Alvary Exan Rerung & Juliati Attu pada tahun 2023 dengan judul penelitian "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale". Berdasarkan hasil penelitian, Politik adalah sesuatu yang baik, sebab bertujuan untuk menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa. Politik menjadi tidak baik sebab usaha-usaha yang dilakukan dalam berpolitik tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan individu saja. Usaha yang mengedepankan kepentingan individu ini seringkali berorientasi pada praktik-praktik berpolitik yang tidak sehat, seperti politik uang dan saling menjatuhkan. Praktik berpolitik tidak sehat seperti ini mudah masuk pada gereja yang warga gerejanya sama sekali tidak memahami sikap gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar. Hal inilah yang membuat warga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale menjadi pelaku dari praktik berpolitik tidak sehat ini. Partisipasi warga GTM Jemaat Sapankale terhadap praktik berpolitik

tidak sehat ini dikarenakan tidak ada yang pernah memberikan pemahaman kepada mereka tentang sikap gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar. Alkitab memberikan referensi tentang beberapa prinsip-prinsip yang bisa dijadikan pedoman gereja dalam mengambil sikap terhadap partisipasi politik, antara lain: Injil mengharuskan gereja untuk aktif dalam partisipasi dan menyebarkan kabar gembira, sehingga dalam kegiatan berpolitik tidak terjadi praktik-praktik yang tidak sehat. Kejadian 1:26 mencatat tentang manusia merupakan gambar dan rupa Allah, hal ini harus menjadi referensi bagi gereja agar terus melihat sikapnya terhadap partisipasi politik agar terus mencerminkan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Berdasarkan Roma 13, maka gereja harus secara aktif melihat bagaimana politik berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Secara keseluruhan, Alkitab dengan tegas tidak menoleransi praktik berpolitik yang tidak sehat. Prinsip-prinsip berpolitik ini harus diajarkan kepada warga gereja, agar mereka bisa mengambil sikap dengan baik ketika berhadapan dengan praktik berpolitik yang tidak sehat. Prinsip-prinsip ini terutama harus diajarkan kepada pemuda, sebab merekalah yang menjadi penerus tongkat estafet pelayanan di gereja. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tahun penelitiannya, lokasi penelitiannya, dan juga tinjauan pustakanya, penelitian terdahulu menggunakan teori partisipasi politik dan di penelitian ini memakai teori aktor politik dan pendekatan Kristen.

1.3.6 Skema Penelitian



Gambar 1. Skema Penelitian

BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan tempat dan waktu, bahan dan alat, metode penelitian, dan pelaksanaan penelitian yang memuat tipe dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

2.1 Tempat dan Waktu

2.1.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi (Nasution, 2003). Penelitian ini dilakukan pada Gereja GBI Filadelfia yang cukup besar di Kota Makassar dengan sebaran gereja ada di Kec. Makassar dan Kec. Panakkukang. Selain itu, Penulis juga melakukan Penelitian di Gereja GBI ROCK dan GPIB Imanuel. Ketiga gereja tersebut merupakan gereja besar yang ada di Kota Makassar dan terkenal sebagai pelopor terbentuknya persatuan Jaringan Doa di Kota Makassar. Sebagai validitas data dan data perbandingan, Penulis juga melakukan penelitian pada Beberapa masyarakat yang tersebar dalam lingkup ketiga wilayah gereja tersebut. Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Penelitian ini melihat kecenderungan keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto pada pilwakot Makassar tahun 2020 sehingga tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana Aktor gereja terlihat ada indikasi dalam strategi pemenangan Walikota Danny Pomanto pada tahun 2020 di Kota Makassar.

2.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merujuk pada durasi keseluruhan yang digunakan untuk merancang, mengumpulkan data, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Ini mencakup beberapa tahapan penting, dimulai dari perencanaan dan desain penelitian, di mana peneliti

mengidentifikasi masalah, melakukan kajian literatur, dan merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, yang bisa memakan waktu beberapa bulan tergantung pada metode yang digunakan dan skala penelitian. Setelah data terkumpul, tahap analisis data dilakukan untuk menyortir, membersihkan, dan menganalisis informasi yang diperoleh. Proses ini diikuti oleh penulisan laporan dan publikasi, di mana peneliti menyusun temuan dalam bentuk laporan atau artikel ilmiah yang siap dipublikasikan. Terakhir, hasil penelitian disebarakan melalui presentasi di konferensi atau seminar, dan dipublikasikan di jurnal ilmiah atau media lainnya. Durasi setiap tahap dapat bervariasi, tetapi pengelolaan waktu yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat diselesaikan sesuai jadwal dan menghasilkan output yang berkualitas. Penelitian penulis dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2024.

2.2 Metode Penelitian

Pada tahapan ini, penulis akan menguraikan lebih jelas terkait bagaimana metode penelitian yang digunakan dengan memaparkan pendekatan penelitian, tipe penelitian, jenis dan sumber data penelitian.

2.2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Kriyantono, 2014). Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan pengamatan berbagai data Untuk Menjelaskan Kecenderungan Keterlibatan Aktor Gereja terhadap Danny Pomanto pada Pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

2.2.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik menggambarkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan peneliti untuk ditarik kesimpulan (Rukajat, 2018). Penelitian ini selanjutnya akan menjelaskan Kecenderungan Aktor Gereja dalam Kemenangan Danny Pomanto pada Pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

2.2.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus yang terfokus pada suatu hubungan dan korelasi tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat (Hadar, 2003). Adapun jenis yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dimana data-data dikumpulkan lalu diinterpretasi dengan tepat. Penelitian ini mengangkat Kecenderungan Keterlibatan Aktor Gereja Terhadap Danny Pomanto pada Pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

2.2.4 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara bersama informan yaitu akademisi STT Jefri dan Para pendeta Gereja GBI Filadelfia Kec. Makassar, Kec. Panakkukang. Dan juga pendeta yang ada di Gereja GBI ROCK dan GPIB Imanuel. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dalam kurun waktu bulan April 2024 hingga bulan Mei 2024. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara diolah menggunakan metode triangulasi, dimana hasil wawancara informan sebelumnya dikonfirmasi kebenarannya dan diperkaya pada jawaban informan lainnya.

2.2.5 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang dapat berasal dari berbagai tulisan, media, dan publikasi kegiatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang

bersumber dari berita di media online yang berkaitan dengan Kecenderungan keterlibatan aktor gereja terhadap Danny Pomanto pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020. Data sekunder menjadi sumber data bagi penulis untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa diperoleh secara langsung melalui informan karena berbagai kendala dan keterbatasan akses kepada informan.

2.3 Pelaksanaan Penelitian Data

Pelaksanaan penelitian merujuk pada tahapan penulis melakukan pengumpulan data yang merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan yaitu:

2.3.1 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara mendalam, dimana ada proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan semi terstruktur (Bungin, 2017). Wawancara diarahkan mengenai bagaimana memperlihatkan kecenderungan aktor gereja termasuk gembala, jemaat dan umat dalam keterlibatannya terhadap Danny Pomanto pada pilwakot tahun 2020 di Kota Makassar sehingga akan sesuai rencana pertanyaan utama yang telah disusun, dan bila informan memberikan jawaban yang menarik untuk digali maka peneliti akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru yang relevan. Informan penelitian merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini penulis memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi

yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Informan berasal dari Partai Amanat Nasional dan Pesantren Asadiyah Kabupaten Wajo. Adapun Informan yang terlibat dalam penelitian ini ialah:

1. Akademisi STT Jefri dan Pendeta GBI Filadelfia

Alasan penulis memilih Dr. Andi Mulyadi Sapan karena *accessibility* yang mumpuni dan terbilang mendukung penelitian, belum lagi bahwa beliau adalah Pendeta yang cukup besar dan terkenal di Kota Makassar. Selain itu, penulis memilihnya dikarenakan beliau memiliki data dan pengalaman akan keterlibatannya terkait studi kasus yang akan diteliti penulis.

2. Pendeta Gereja GBI Rock.

Alasan penulis memilih Dr. Heintje Kobstan karena *accessibility* beliau yang cukup baik dalam mimbarnya memimpin jemaat dan umat yang massanya bisa dibilang besar dan terkenal yang selalu dilaksanakan di The Rinra Hotel Makassar. Selain itu, beliau juga termasuk bagian dari jaringan doa yang akan memudahkan penulis untuk menelusuri lebih jauh studi kasus penelitian.

3. Pendeta Gereja GPIB Jemaat Immanuel

Alasan penulis memilih Avalien Fransisca Dalawir karena pemahaman beliau dan keterlibatannya dalam jaringan doa yang bisa dibilang besar dan terkenal dalam persatuan umat kristiani.

4. Masyarakat/Jemaat Gereja Setempat

Alasan Penulis memilih Masyarakat/Jemaat ialah sebagai bentuk data pembanding penulis dan penelitian yang membuktikan validitas penelitian ini.

2.3.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merujuk pada bagian menelisik dan mengkaji lebih dalam hasil wawancara.

2.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi berupa data sekunder seperti arsip, dokumen, laporan, berita, gambar, maupun berbagai tulisan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

2.4 Pengamatan

Pengamatan pada penelitian sosio deskriptif ini lebih merujuk pada analisis data kualitatif yang umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipertemukan itu, memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekadar untuk menjelaskan fakta tersebut. Dalam pengamatan dalam hal analisis data kualitatif ada tiga tahapan yang harus dilakukan Tahap reduksi yang merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna (Sugiyono, 2017). Penyajian data yang melakukan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dan terakhir Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.